



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi

Addini Fitri Fadilah¹, Sri Andriani²

*^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang*

** Corresponding author email: addinifitrifadilah@gmail.com*

Abstract

This study analyzes the effect of regional original revenue, capital expenditure, and balancing funds on local government financial performance in Indonesia with community participation as a moderating variable. The sample covers 31 provinces in Indonesia for a period of 2019-2023. The data used are obtained from APBD Realization Report. The results showed that regional original revenue and capital expenditure have positive effects on the financial performance of local governments. However, the balance fund does not have a significant effect. Community participation is able to moderate the relationship between independent variables and financial performance. This study suggests that increased public participation in budget planning, monitoring, and evaluation is needed to support better financial management.

Keywords: Local Own Revenue, Capital Expenditure, Balance Fund, Financial Performance, Public Participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Sampel meliputi 31 provinsi di Indonesia pada periode 2019-2023. Data yang diperlukan berasal dari Laporan Realisasi APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan. Partisipasi masyarakat secara efektif mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan kinerja keuangan. Penelitian ini menyarankan agar peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan, Partisipasi Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah memerlukan kebijakan ekonomi yang baik untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi inefisiensi guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah daerah berperan penting dalam hal ini melalui pengelolaan keuangan yang efektif, yang tercermin dalam kinerja keuangan daerah. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana perimbangan, yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Andjarwati et al., (2021); Simamora & Budiwitjaksono (2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat Ardedia et al., (2022). Sementara itu, belanja modal berperan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah. Namun, pengelolaan yang buruk dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan Karlinda et al., (2021). Dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah, meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan justru dapat berdampak negatif terhadap kemandirian fiskal daerah (Thalib & Ekaningtias, 2019; S. P. Putri & Ratnawati, 2023).

Selain faktor-faktor tersebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik Yunita & Rasmini (2018). Masyarakat yang aktif dalam membayar pajak dan mengawasi proyek pembangunan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Namun, studi yang menguji bagaimana partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh PAD, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada meneliti partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan kinerja keuangan daerah. Penurunan realisasi belanja modal menjadi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, pada semester I tahun 2019, realisasi belanja modal pemerintah Indonesia mengalami penurunan sebesar 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya meliputi proses administrasi yang kompleks dan keterlambatan pencairan anggaran, yang berdampak negatif terhadap proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah Rika (2019). Infrastruktur yang kurang memadai akibat penurunan belanja modal dapat menghambat aktivitas ekonomi serta menurunkan PAD. Selain itu, berkurangnya dana perimbangan menyebabkan daerah kesulitan membiayai proyek-proyek pembangunan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketidakmampuan daerah dalam merealisasikan belanja modal juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keterbatasan dana membuat masyarakat sulit untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Andriani (2012). Berdasarkan berbagai penelitian, terdapat ketidakkonsistenan dalam temuan mengenai hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Digdowiseiso et al., (2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Azhar (2021), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian oleh

Simamora & Budiwitjaksono (2022) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil penelitian dari Thalib & Ekaningtias (2019) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, menurut Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus (2023), dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, Yuliawati et al., (2024) menyampaikan hasil yang bertentangan, yaitu bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuka ruang untuk mempertimbangkan adanya faktor moderasi yang dapat memengaruhi hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat relevan untuk dijadikan variabel moderasi karena berbagai alasan. Pertama, partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Putra et al., (2020) pengawasan publik dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran dan memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, sehingga berpotensi memoderasi hubungan antara belanja daerah dan kinerja keuangan pemerintah. Kedua, masyarakat yang terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan keuangan daerah dapat meningkatkan efektivitas alokasi dana. Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas et al., (2022) partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa belanja modal digunakan untuk proyek-proyek yang benar-benar memberi dampak pada kinerja pemerintah daerah, sehingga belanja modal yang dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Ketiga, di Indonesia, partisipasi masyarakat telah diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*), yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan daerah Kementerian Dalam Negeri (2022). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Secara teoretis, hal ini juga didukung oleh teori *stakeholder*, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada keterlibatan semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitasnya Freeman (1984). Dalam konteks ini, masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* utama memiliki peran signifikan dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan agen yang mencakup pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Agen, dalam hal ini manajer, bertanggung jawab secara moral untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun mereka juga memiliki kepentingan pribadi untuk meningkatkan

kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga relevan untuk sektor publik. Dalam negara demokratis, hubungan keagenan terjadi antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah (agen), atau antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Teori keagenan mengkaji hubungan antara prinsipal, yang mendelegasikan wewenang, dan agen, yang memiliki akses informasi berbeda Dewata et al., (2021). Menurut Putri & Amanah (2020) perbedaan informasi ini bisa menyebabkan penipuan atau korupsi oleh agen. Teori ini mengasumsikan bahwa untuk mengurangi potensi penipuan, akuntabilitas harus tersebar di berbagai daerah, meningkatkan efisiensi melalui checks and balances. Pemerintah daerah sebagai agen sadar akan kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat mungkin tidak selalu percaya mereka bekerja demi kepentingan terbaik mereka. Umpan balik warga diharapkan mengurangi asimetri informasi dan menyeimbangkan akuntabilitas antara daerah dan pemerintah daerah.

Teori agensi menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai agen bertindak atas nama masyarakat (prinsipal) dan dapat dipercaya karena menyadari tugas mereka. Agen bertanggung jawab atas pengelolaan aset untuk meningkatkan pendapatan prinsipal Ardelia et al., (2022). Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan sumber daya tambahan yang disediakan oleh kabupaten khusus Aulia & Rahmawaty (2020). Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menunjukkan bahwa pemerintah sebagai agen harus menetapkan strategi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat, sebagai prinsipal, mengharapkan kinerja yang baik dari pemerintah yang dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik. Kualitas laporan keuangan dan pelayanan ini tergantung pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Jika pemerintah menunjukkan kinerja yang baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Thalib & Ekaningias, 2019).

Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Thalib & Ekaningias (2019); Ardelia et al., (2022). Optimalisasi PAD mendukung keberlanjutan fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Andjarwati et al., (2021). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan merealisasikan kebijakan pembangunan yang lebih fleksibel serta menyesuaikan dengan kebutuhan lokal Digdowiseiso et al., (2022) Penelitian menunjukkan bahwa PAD berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah karena mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. (Dwigantara & Handayani, 2020).

Peningkatan PAD juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah yang memiliki sumber pendapatan sendiri lebih bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran, sehingga kinerja keuangan menjadi lebih optimal. Penelitian oleh Ardelia et al., (2022); Digdowiseiso et al., (2022) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan

pemerintah daerah. Dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia, keduanya menegaskan bahwa peningkatan PAD mendukung stabilitas, efisiensi, dan perbaikan signifikan dalam kinerja keuangan. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa PAD adalah indikator utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardelia et al., (2022) ; Digdowiseiso et al., (2022) mendukung argumen ini dengan menemukan hubungan positif antara PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan kinerja keuangan dengan memberikan kemandirian finansial bagi pemerintah daerah, sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan PAD yang kuat, daerah memiliki fleksibilitas dalam mengatur anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, peningkatan PAD mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, karena masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan dana yang bersumber dari kontribusi lokal seperti pajak dan retribusi. PAD yang stabil juga memungkinkan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat basis ekonomi daerah. Semua faktor ini secara kolektif berkontribusi pada optimalisasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, PAD yang tinggi menjadi indikator utama keberhasilan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri.

Berdasarkan diskusi diatas, hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berhubungan Positif dengan Kinerja Keuangan

Belanja Modal dan Kinerja Keuangan

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk investasi produktif dalam bentuk akuisisi aset tetap seperti bangunan, tanah, dan peralatan yang bertujuan meningkatkan efektivitas layanan publik Digdowiseiso et al., (2022); Wahyudin & Hastuti (2020). Belanja modal berperan dalam pembangunan infrastruktur serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Maulina et al., (2021). Belanja modal adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap seperti infrastruktur, sarana publik, dan fasilitas lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Secara teoritis, belanja modal yang dikelola dengan baik akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena menciptakan aset yang memberikan manfaat jangka panjang. (Ardelia et al., 2022; Thalib & Ekaningtias 2019).

Hasil penelitian Lathifa & Haryanto (2019) menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek pelayanan publik dan investasi daerah. Namun, efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan bergantung pada transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Jika belanja modal tidak digunakan secara optimal, maka dapat menyebabkan pemborosan anggaran tanpa peningkatan signifikan dalam kinerja keuangan daerah. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Simamora & Budiwitjaksono (2022) serta Lathifa & Haryanto (2019), menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan sampel pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Jawa

Tengah, kedua studi sepakat bahwa pengelolaan belanja modal yang didukung pengawasan ketat dan perencanaan matang dapat meningkatkan kinerja keuangan secara optimal.

Berdasarkan diskusi diatas, hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut:

H₂: Belanja Modal berhubungan Positif dengan Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah Nugraha (2019). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang masing-masing memiliki peran dalam pemerataan keuangan dan peningkatan kesejahteraan daerah Andaresta et al., (2021). Pendapatan pemerintah daerah yang di transfer oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah Thalib & Ekaningtias (2019). Dana perimbangan akan dimasukkan ke dalam akun pendapatan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan total pendapatan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Semakin tinggi dana perimbangan, maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah Thalib & Ekaningtias (2019). Untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah Sari (2016). Keterkaitan dengan teori keagenan, pemerintah daerah diharuskan bertanggung jawab atas kewenangan tersebut dengan melakukan pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang optimal dan merata (Ardelia et al. 2022).

Dana perimbangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena tingginya ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan anggaran. Ketergantungan ini sering kali menyebabkan alokasi anggaran yang kurang optimal, di mana dana digunakan untuk belanja rutin daripada investasi produktif yang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perimbangan dapat memicu pemborosan anggaran dan inefisiensi. Penelitian oleh Ratnasari & Meirini (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan perencanaan anggaran yang matang.

Hasil penelitian Ardedia et al., (2022) menyatakan dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan pada kinerja keuangan pemerintah daerah, Thalib & Ekaningtias (2019) menyatakan Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, menurut Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus (2023) bahwa Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi pada dana perimbangan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan sampel dari pemerintah daerah Indonesia dan kabupaten di Jawa Timur, keduanya menemukan bahwa dana perimbangan yang tidak dikelola secara optimal mengurangi efisiensi dan insentif peningkatan PAD, sehingga menurunkan kinerja keuangan.

Berdasarkan diskusi diatas, hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut:

H₃: Dana Perimbangan berhubungan Positif dengan Kinerja Keuangan

Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, terutama dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang Putra & Rasmini (2019). Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pembayaran pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah Yunita & Rasmini (2018). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah tidak beroperasi sendirian, melainkan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah bersama-sama bertanggung jawab dan saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan sejahtera. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah dengan mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD ini akan memberikan dampak yang terhadap kinerja pemerintah daerah Ayu (2018). Dengan aktif membayar pajak daerah, partisipasi masyarakat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah ini, pada gilirannya, meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah dapat membiayai otonomi sendiri. Semakin tinggi PAD dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Yunita and Rasmini 2018).

Hasil penelitian Yunita & Rasmini (2018) menunjukkan partisipasi masyarakat memperkuat dampak pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah (Maulida'arifina, 2024). Berdasarkan diskusi diatas, hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan yang di moderasi partisipasi masyarakat dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut:

H₄: Partisipasi masyarakat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan.

Tujuan dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, yang dibiayai oleh belanja modal. Tingginya belanja modal mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang berhasil dibangun. Belanja modal yang efektif dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi Dewi & Dicriyani (2018). Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara logis, semakin banyak sumber yang dihasilkan, semakin besar pula hasil yang diperoleh. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah akan membantu pemerintah membiayai kebutuhan belanja modalnya.

Beberapa hasil studi yang dilakukan oleh Yunita & Rasmini (2018) Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian lain menunjukkan partisipasi masyarakat tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Maulida'arifina, 2024).

Berdasarkan diskusi diatas, hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan yang di moderasi partisipasi masyarakat dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut:

H₅: Partisipasi masyarakat memoderasi hubungan belanja modal dan kinerja keuangan.

Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah akan lebih efektif jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengawasan dan penganggaran, penggunaan dana perimbangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penelitian Dewi & Dicriyani (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai pengawas dalam memastikan bahwa transfer dana dari pusat digunakan secara optimal dan tidak hanya menjadi sumber ketergantungan fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana perimbangan menjadi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Yunita & Rasmini (2018) menunjukkan Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan diskusi diatas, hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan yang di moderasi partisipasi masyarakat dapat diformulasikan dalam hipotesis berikut:

H₆: Partisipasi masyarakat memoderasi hubungan dana perimbangan dan kinerja keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Sampel

Sampel penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara publik dari tahun 2019 hingga 2023. Dari 38 provinsi yang tersedia sebanyak 31 provinsi dipilih berdasarkan kelengkapan data dan menghasilkan 155 observasi. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Wilayah Provinsi di Indonesia yang menyajikan Data Laporan Realisasi APBD di Situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 2) Menerbitkan data Laporan Realisasi APBD yang tersedia secara publik tahun 2019 – 2023. 3) Menyajikan data lengkap dan akurat untuk keperluan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan sesuai dengan metode *Value for Money*. 4) Menyajikan data yang tidak terindikasi anomali atau sesuai dengan Pemerintah Daerah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 1 menyajikan definisi variabel dan cara pengukuran indikatornya. Perlu dicatat bahwa proses deflasi telah dilakukan terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal (BM), dan dana perimbangan (DP) dengan membagi nilainya dengan total aset pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mengendalikan perbedaan ukuran pemerintah daerah

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total realisasi pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri.	$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$	(Mulyani & Wibowo, 2017)
2.	Belanja Modal (BM)	Realisasi penerimaan Belanja Modal Pemerintah daerah Provinsi di Indonesia	$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jala, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Lainnya}$	(Yunita & Rasmini, 2018)
3.	Dana Perimbangan (DP)	Jumlah seluruh realisasi dari pemerintah pusat.	$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$ DBH = Dana Bagi Hasil DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus	(Nauw & Riharjo Ikhsan Budi, 2021)
4.	Kinerja Keuangan (KK)	Rasio analisis efektivitas atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target realisasi anggaran	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$	(Lona, Perseveranda & Manafe, 2023)

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
		pendapatan dikalikan dengan 100%.		
5.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat merupakan peran masyarakat dalam turut serta membiayai penyelenggaraan negara yang diwujudkan dengan melakukan pembayaran pajak.	$PM = \frac{PD_{t1} - PD_{t0}}{PD_{t0}}$ PM = Partisipasi Masyarakat PD _{t1} = Pendapatan daerah tahun saat ini PD _{t0} = Pendapatan daerah tahun sebelumnya	(Yunita & Rasmini, 2018)

yang digunakan sebagai sampel. Selain itu, proses deflasi juga dilakukan untuk memfasilitasi perbedaan unit pengukuran antara variabel satu dengan yang lain. Dalam bentuk yang asli, kinerja keuangan dan partisipasi masyarakat dihitung dalam bentuk persentase sedangkan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan dalam milyaran rupiah. Jika tidak dilakukan deflasi terhadap angka-angka tersebut, maka koefisien regresi yang dihasilkan menjadi tidak masuk akal.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman. Model regresi yang digunakan adalah:

$$KK_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 DP_{it} + \beta_4 PM + \beta_5 PAD_{it} PM + \beta_6 BM_{it} PM + \beta_7 DP_{it} PM + e_{it}$$

Keterangan: KK = Kinerja Keuangan; PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD); BM = Belanja Modal (BM); DP = Dana Perimbangan (DP).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang digunakan dalam model penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP), dan Partisipasi Masyarakat (PM), yang merepresentasikan kinerja keuangan. Hasil output dari analisis statistik deskriptif menunjukkan distribusi nilai untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2 kinerja keuangan memiliki nilai maksimum sebesar 1,55 pada Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, nilai minimum sebesar 0,75 pada Provinsi Maluku Utara tahun 2023. Nilai rata-rata 1,01 menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu mengelola anggaran dan pendapatan secara efisien sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini merefleksikan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan strategi keuangan daerah untuk

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
KK	155	0,75	1,55	1,01	0,11
PAD	155	0,02	0,36	0,19	0,08
BM	155	0,02	0,15	0,08	0,03
DP	155	0,10	0,45	0,26	0,08
PM	155	-0,66	0,64	0,01	0,12

mencapai hasil yang lebih baik daripada ekspektasi awal. PAD memiliki nilai rata-rata 0,19 yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan masih terbatas. Hasil ini mengindikasikan bahwa optimalisasi sumber daya lokal sebagai komponen utama pendapatan daerah memerlukan perhatian lebih, meskipun terdapat variasi signifikan antar daerah yang menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Belanja Modal (BM) nilai rata-rata 0,08 atau menunjukkan bahwa alokasi belanja modal daerah masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan fisik. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan investasi pada belanja modal untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dana Perimbangan (DP) memiliki nilai maksimum sebesar 0,45 pada Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan nilai minimum 0,10 pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2022. Nilai rata-rata 0,26 menunjukkan bahwa dana perimbangan berkontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan utama dalam mendukung operasional dan pembangunan daerah. Kendati demikian, variasi distribusi antar daerah menuntut pengelolaan yang lebih efektif untuk memastikan pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi Masyarakat (PM) memiliki nilai tertinggi sebesar 0,64 pada Provinsi Papua tahun 2023 dan nilai terendah -0,66 pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Nilai rata-rata 0,01 menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah secara keseluruhan. Rendahnya partisipasi ini mengisyaratkan perlunya upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih aktif, terutama dalam pengawasan dan evaluasi anggaran.

Analisis Pemilihan Model

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yang melibatkan pemilihan model regresi yang tepat antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model terbaik, dilakukan uji pemilihan model yang mencakup uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

Uji Chow digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Keputusan pemilihan model didasarkan pada nilai probabilitas untuk cross

section F. Jika nilai probabilitas F lebih besar dari 0,05, maka *Common Effect Model* dipilih, sementara jika nilai probabilitas F kurang dari 0,05, maka *Fixed Effect Model* yang dipilih.

Tabel 3. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,85	(30,12)	0,00
Cross-section Chi-square	82,79	30	0,00

Berdasarkan hasil uji Chow yang disajikan pada Tabel 3, nilai cross-section F dan cross-section Chi-square menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05, dengan $p = 0,00 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa model terbaik yang dipilih dari uji Chow adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, pengujian model akan dilanjutkan dengan uji Hausman.

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Keputusan pemilihan model didasarkan pada nilai probabilitas untuk cross-section random. Jika nilai $p < 0,05$, maka *Fixed Effect Model* dipilih, sementara jika nilai $p > 0,05$, maka *Random Effect Model* yang dipilih.

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22,47	3	0,00

Berdasarkan hasil uji Hausman yang disajikan pada Tabel 4, nilai cross-section random lebih kecil dari nilai alpha 0,05, yaitu $0,00 < 0,05$. Oleh karena itu, model yang dipilih berdasarkan uji Hausman adalah *Fixed Effect Model*. Dengan demikian, hasil dari uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data *cross-section* dan *time series* untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan lebih mendalam. Penelitian ini memanfaatkan data *time series* selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023, serta data *cross-section* dari 31 Provinsi di Indonesia yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil analisis pemilihan model regresi menunjukkan bahwa pendekatan terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, yang merupakan bagian dari kerangka kerja *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Setelah menentukan model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Dana Perimbangan (DP), dengan variabel dependen Kinerja Keuangan (KK) yang diukur melalui Pengukuran Efektivitas. Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel berikut.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Berdasarkan Tabel 5 uji normalitas data menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,12 yang menunjukkan bahwa data ini terdistribusi

secara normal. Hasil output korelasi dalam uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi untuk semua variabel independen kurang dari 0,85. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas di antara variabel independen dalam model penelitian ini. Uji Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari residual berubah-ubah dan bergantung pada nilai variabel independen, bukannya konstan. Pada cross-section test dan period test diatas yaitu menghasilkan “*residuals are homoscedastic*” yang artinya variansi dari error bersifat tetap/konstan (*homoscedastic*).

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas		Multikolinearitas				Heteroskedastisitas	
Prob.	0,12		PAD	BM	DP		Period
		PAD	1,00	-0,45	-0,46	Cross-section	Residuals are homoskedastic
		BM	-0,45	1,00	0,40		
		DP	-0,46	0,40	1,00		

Uji Hipotesis

Tabel 6 menyajikan hasil pengujian *moderated regression analysis* (MRA). Dari tabel dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dengan koefisien regresi sebesar 1,59 dan nilai signifikansi 0,00. Dengan demikian hipotesis satu (H1) diterima. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 1,32 dan nilai signifikansi 0,00. Dengan demikian hipotesis dua (H2) diterima. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan koefisien regresi sebesar 0,13 dan nilai signifikansi 0,55. Dengan demikian hipotesis tiga (H3) diterima. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa bahwa partisipasi masyarakat mampu memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan dengan koefisien regresi sebesar 1,20 dan nilai signifikansi sebesar 0,02. Dengan demikian hipotesis empat (H4) diterima. Partisipasi masyarakat juga dapat memoderasi hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan dengan koefisien regresi sebesar -6,50 dan nilai signifikansi 0,04. Dengan demikian hipotesis lima (H5) diterima. Partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan dengan koefisien regresi sebesar 5,24 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Dengan demikian hipotesis enam (H6) diterima.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	1,59	0,27	5,82	0,00
BM	1,32	0,38	3,43	0,00
DP	0,13	0,21	0,60	0,55
PM	-0,70	0,22	-3,26	0,00
PAD*PM	1,20	0,52	2,28	0,02
BM*PM	-6,50	3,26	-1,99	0,04
DP*PM	5,24	0,90	5,83	0,00
$R^2 = 0,68$				

Analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,68 atau 68%. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan sebesar 68%.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Peningkatan PAD memberikan lebih banyak sumber daya bagi pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik. Selain itu, PAD yang tinggi mencerminkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang memperkuat kapasitas keuangan daerah secara keseluruhan.

Dalam konteks Teori Keagenan Jensen & Meckling (1976), tingginya PAD menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah sebagai agen dalam mengelola aset untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai prinsipal. Ketika PAD dikelola secara transparan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung, masyarakat memperoleh kepercayaan lebih terhadap pemerintah, sehingga mencegah kesenjangan pemahaman dan informasi antara masyarakat dan Pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardelia et al., (2022) dan Digdowiseiso et al., (2022), ditemukan bahwa terdapat keterkaitan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal untuk infrastruktur fisik dan aset jangka panjang berkontribusi signifikan pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan belanja modal yang terencana dengan baik dapat mendorong efektivitas alokasi anggaran, mendukung pembangunan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan yang baik terhadap belanja modal akan memberikan dampak nyata pada kualitas pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamora & Budiwitjaksono (2022) serta Lathifa & Haryanto (2019) mengungkapkan bahwa terdapat dampak positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan teori keagenan, belanja modal yang transparan mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai agen dalam memenuhi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan pengawasan yang efektif, risiko ketidaksesuaian informasi atau komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalkan, sehingga memastikan alokasi belanja modal tepat sasaran.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun dana perimbangan memberikan kontribusi penting bagi kebutuhan fiskal daerah, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh efisiensi pengelolaannya. Dalam beberapa kasus, ketergantungan yang

tinggi terhadap dana perimbangan tanpa disertai inovasi pendapatan daerah menyebabkan dampak yang kurang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen harus mengelola dana perimbangan secara transparan untuk mengurangi risiko kurangnya informasi atau pemahaman yang adil antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan dana digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ardelia et al., (2022) dan Thalib & Ekaningtias (2019), yang menyimpulkan adanya hubungan negatif, maupun penelitian Rustiyani & Irene Sukma Lestari Barus (2023) yang menemukan adanya pengaruh signifikan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan.

Peran Penting Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mampu memoderasi hubungan antara PAD dan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kinerja keuangan. Partisipasi yang aktif menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga pemerintah daerah dapat lebih optimal memanfaatkan PAD untuk pembangunan dan pelayanan publik. Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Berdasarkan teori keagenan, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi kurangnya keselarasan informasi atau komunikasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan keterlibatan masyarakat, akuntabilitas pemerintah meningkat, sehingga pengelolaan PAD lebih efektif dan selaras dengan kepentingan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yunita & Rasmini (2018), yang juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat dampak PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil ini juga berbanding terbalik dengan penelitian Maulida'arifina (2024), yang menyimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan tersebut.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan. Nilai koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, ketika tidak dilaksanakan secara efektif, justru dapat melemahkan hubungan positif antara belanja modal dan kinerja keuangan. Ketidakefektifan partisipasi masyarakat, seperti kurangnya keterlibatan nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan belanja modal, dapat mengarah pada inefisiensi atau pemborosan anggaran, sehingga tujuan belanja modal untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan tidak tercapai secara maksimal.

Dalam konteks ini, mekanisme partisipasi yang lebih terarah, transparan, dan disertai edukasi kepada masyarakat dapat menjadi solusi untuk memastikan dampak positif yang diharapkan dari belanja modal terhadap kinerja keuangan. Pendapat ini sejalan dengan Putnam (1993), yang menyatakan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat bergantung pada kapasitas masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dan efektif dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Dalam kaitannya dengan teori keagenan, partisipasi

yang tidak efektif dapat menciptakan kurangnya kesepahaman antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga menghambat tercapainya tujuan belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan untuk memperbaiki efektivitas belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yunita & Rasmini (2018) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana perimbangan, seperti perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, mampu memperkuat dampak positif dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui partisipasi yang aktif dan efektif, pengelolaan dana perimbangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terarah pada prioritas pembangunan, sehingga mendorong efisiensi penggunaan dana serta peningkatan kualitas layanan publik.

Berdasarkan teori keagenan, partisipasi masyarakat menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan keterlibatan masyarakat yang efektif, potensi komunikasi yang buruk atau pengelolaan dana yang tidak efisien dapat diminimalkan, sehingga hasil pengelolaan dana perimbangan lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yunita & Rasmini (2018), yang juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan temuan Maulida'arifina (2024), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi hubungan tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara dana perimbangan tidak memberikan dampak signifikan. Partisipasi masyarakat mampu memoderasi hubungan antara PAD, belanja modal, dan dana perimbangan dengan kinerja keuangan.

Penelitian ini terbatas pada wilayah provinsi di Indonesia yang menyajikan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode 2019-2023, serta menggunakan data sekunder yang tersedia di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Penelitian ini juga terfokus pada tiga variabel utama dan satu variabel moderasi, sehingga faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel yang digunakan, termasuk faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti ukuran daerah atau efisiensi manajerial. Selain itu, penggunaan data yang lebih panjang dan pengujian lebih lanjut dengan sampel yang lebih beragam dapat meningkatkan validitas hasil penelitian. Disarankan pula untuk mengeksplorasi variabel moderasi lain yang memiliki potensi lebih lanjut untuk memperkuat hubungan antara variabel independen dan kinerja keuangan, guna memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi 2: 1614-24*. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227/882>. *Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(10), 2579–2589.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(10), 2579–2589.
- Andriani, S. (2012). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *EL MUHASABAH: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7(1), 60–80.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *J. Am. Inst. Planners* 35(4), 216–24.
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5(4), 584–98.
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 3(1), 80.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi* 11(02), 164–74.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*.
- Chattha, M. K., Blum, J. B., & Ilman, A. S. (2024). Refining Indonesia's Transfer Mechanism by Using Fiscal Capacity Estimation. *Governance for Development*.
- Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The Effect of Locally Generated Revenue as an Intervening Variable on the Financial Performance of the Regional Government of South Sumatra Province. *Journal of accounting finance and auditing studies (JAFAS)* 7(4), 80–98.
- Dewi, N. L. P. S., & Dicriyani, N. L. G. M. (2018). 1 , 2 1,2.” 1(02), 143–52.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Fair Value jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4(6), 2572–80.

- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(10), 1–22.
- Freeman, R. E., (1984). Stakeholder Theory. <http://stakeholdertheory.org/about/>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also Published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics* (4), 305–60.
- Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). Pengaruh Pengalaman Kerja, Prestasi Kerja, Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pengembangan Karir Pada PT. PLN (Persero) Kota Padang Rayon Kuranji. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. 5(2), 523–31.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting* 8(2), 2337–3806.
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja. *Owner* 7(1), 879–89.
- Maulida'arifina, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi. <http://etheses.uingusdur.ac.id/9982/>.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. Vol. 5 No.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 15(1), 57–66.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). 9 Economists' Voice *Public Finance in Theory and Practice*.
- Nauw, E. T., & Budi, R. I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 10 No.
- Negeri, Kementerian Dalam. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2022. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/halaman/detail/laporan-kinerja-tahun-2022>.
- Nugraha, A. C. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2017).

- Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 25(1), 124–35.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 28: 132.
- Putra, Y. D., & Mawardi, I. (2020). Eliminasi Risiko Operasional Bmt Sri Sejahtera Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6(7), 1317. doi:10.20473/ vol 6iss20197 pp1317-1330.
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya* 6(2), 2068–82.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi* 17(1), 38–47.
- Rika, H. (2019). Realisasi Belanja Modal Pemerintah Turun 15 Persen. *CNN Indonesia*.
- Rustiyani, N., & Barus, I. S. L. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon* 3(1), 679–92.
- Simamora, W. C., & Budiwitjacksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6(2), 410.
- Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The Effect of Original LG Revenue, Balancing Fund, and Capital Expenditure on LG Financial Performance in Regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review* 9(1), 39–49.
- Triwahyuni, T., & Prasetyo, A. (2021). Pencegahan Fraud Pada Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Gombong: Peran Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Etis Organisasi. *Accounting and Management Journal* 5(2), 44–55.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal* 1(1), 86–97.
- Yuliawati, S., Zuliyana, M., & Rani, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Sumatera. 6(1), 13–29.

Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2018). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia. *e-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1049-1065.